



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**BAB II**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**Pasal 2**

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
  - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - e. BAB V PENUTUP

**Pasal 3**

Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 4**

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan RKPD.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

LAMPIRAN X : PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 91 TAHUN 2025  
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2026



# RENJA 2026



## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam* ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam* dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam* Tahun 2026

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam* dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyeksikan visi dan misi Pemerintah Kota Batam



Batam, 09 September 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Batam

RIAMA MANURUNG, SH., MH  
NIP. 197005151997032001

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah.....	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah .....	1
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan . dokumen perencanaan lainnya .....	2
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	31
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	31
2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah .....	31
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan .....	32
2.3.3 Peluang dan Tantangan .....	34
2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	57
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	58
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	58
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	62
3.3 Program dan Kegiatan .....	63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	78
BAB V PENUTUP .....	86
5.1 Catatan Penting .....	86
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan .....	87
5.3 Rencana Tindak Lanjut .....	87

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Batam .....	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam .....	29
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Batam .....	38
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam .....	57
Tabel 3.1	Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional Dengan Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2026...	59
Tabel 3.2	Target Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Batam Tahun 2026 .....	63
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Batam .	68
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 .....	79

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renja .....	2
Gambar 1.2	Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	3

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

##### **1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah**

Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Di dalam Renja berisikan juga evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan Pemerintahan Umum, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

##### **1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

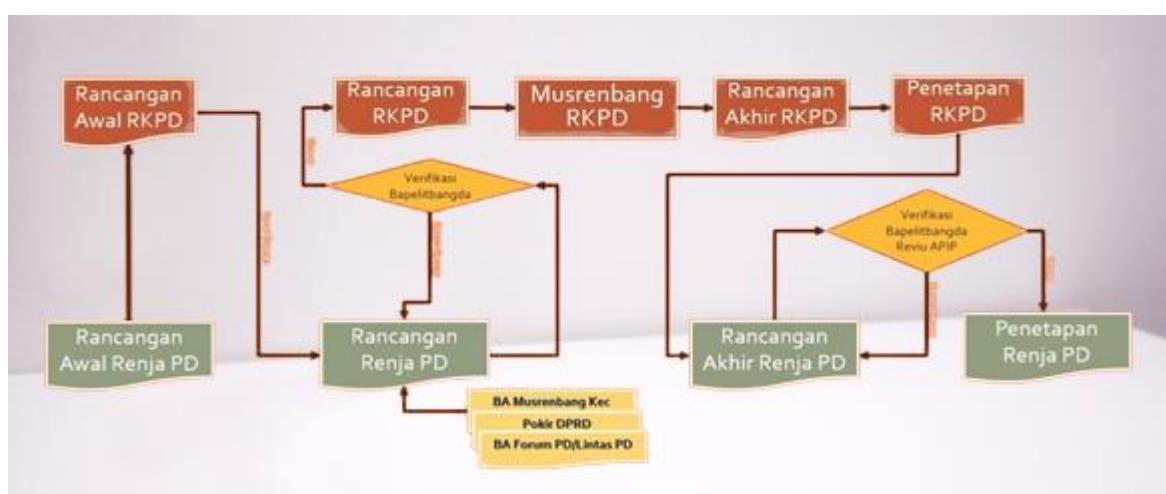
Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renja

- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

**Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja**

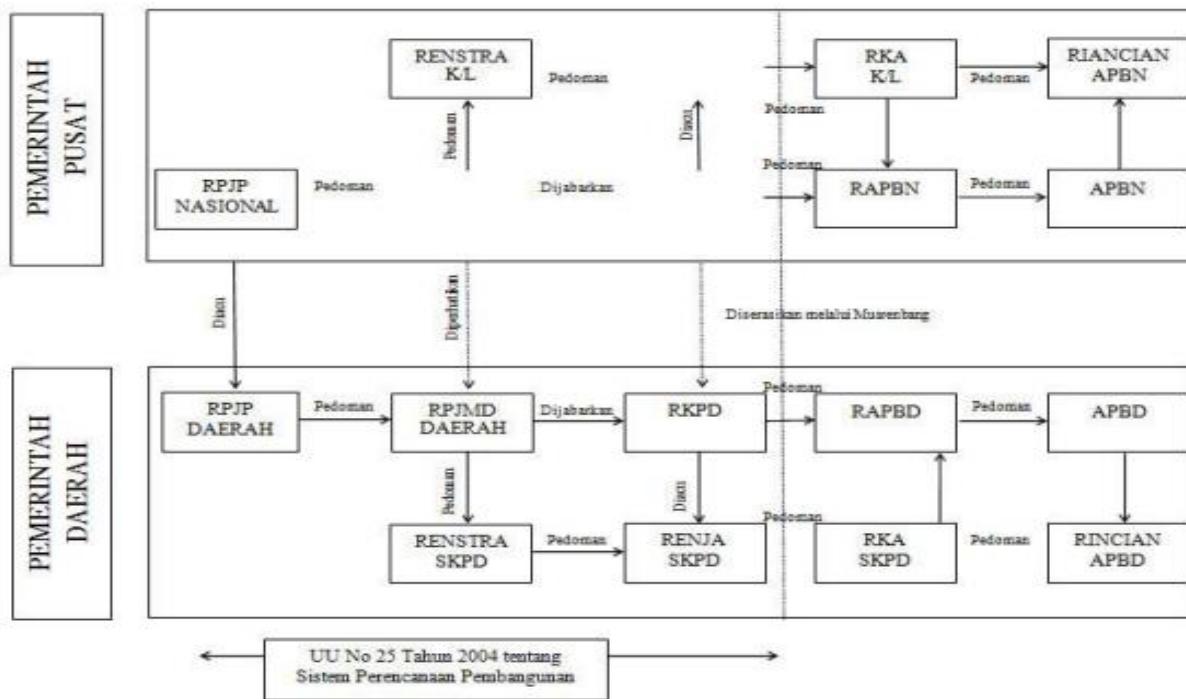


### 1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



## 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik* Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
  11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

- Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 39);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6).
  13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4)
  14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546).
  15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614).
  16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor ..... Tahun ..... tentang Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun ..... Nomor .....).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2026, dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2026.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

### BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penulisan (1.1), dasar hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4).

### BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (2.1), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah (2.2), isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (2.3), review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (2.4) dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (2.5).

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional (3.1). tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah (3.2), program dan kegiatan (3.3) yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun (n) yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tahun (n).

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun (n)

### BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan, catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik* Kota Batam Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2024 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota target fisik yaitu 100 % terealisasi 99.24 %
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari target fisik yaitu 100 % mencapai 96.24 %
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target fisik yaitu 100 % mencapai 100 %
  - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target fisik yaitu 100 % mencapai 100 %
  - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari target fisik yaitu 100 % mencapai 100 %
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  - a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dari target fisik yaitu 100 % mencapai 100 %  
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan target fisik yaitu 100 % mencapai 100 %

b. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, target fisik yaitu 1 kebijakan, teralisis 1 kebijakan.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi, dengan indikator Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang diusulkan dengan target 30 rekomendasi terealisasi 30 rekomendasi dan indikator Persentase Peserta Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan target 100% terealisasi 100%.

c. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, terdiri dari dua indikator yakni :

1. Jumlah Kebijakan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Ditetapkan dengan target 1 kebijakan realisasi 1 kebijakan
2. Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif dengan target 100 % terealisasi 100 %
  - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti target 100 % terealisasi 100 % dan indikator Jumlah Kelurahan yang Memiliki Satgas Kelurahan Bersih dari Narkoba (Bersinar) target 25 kelurahan terealisasi 25 kelurahan.

d. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik terdiri dari dua indikator yakni :

1. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang Ditetapkan dengan target 100 % terealisasi 100 %
2. Persentase Peningkatan Pemahaman Peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan target 100 % terealisasi 100 %

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan indikator Persentase Pemahaman peserta Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan target 100 % realisasi 100 % dan indikator Persentase Peserta/Unit yang dimonev dan Menindaklanjuti hasilnya dengan target 85% realisasi 85% serta indikator Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang akan Diusulkan dengan target 100% dan terealisasi 100%.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang terdiri dari indikator :

1. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang Ditetapkan dengan target 100 % terealisasi 100 %
2. Persentase Potensi Konflik yang Terdeteksi target 80 % realisasi 94.11 %

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, Indikator adalah Jumlah Potensi Konflik yang Terdeteksi dengan target fisik yaitu 34 konflik terealisasi 32 konflik.

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tidak tercapai disebabkan karena belum teralisasinya Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN hal ini disebabkan target yang sebelumnya 39 orang dirubah menjadi 41 orang karena ada rencana mutasi masuk pegawai sebanyak 2 orang. Sedangkan realisasinya ada 3 orang pegawai yang keluar pada TW ke II dan 2 orang pegawai masuk pada TW IV.

- b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial indikator pada program ini yang melebihi target adalah indikator Persentase potensi konflik yang terdeteksi dengan target 80% terealisasi 94.11 disebabkan karena jumlah konflik yang terdeteksi pada tahun 2024 adalah sebanyak 34 konflik dan pada indikator Persentase Rekomendasi Forkopimda yang Ditetapkan sebagai Kebijakan sebanyak 81% dan terealisasi sebesar 92.82 kegiatan untuk forkopimda pelaksanaanya ada di Bagian Tata Pemerintahan Kota Batam dan pada tahun 2025 sudah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan indikator Persentase Masyarakat (Peserta Bimtek) yang Mampu Membantu Melakukan Kewaspadaan dan Deteksi Dini dengan target 75% terealisasi 95.38 ini melebihi dari target yang ditetapkan karena Tingkat kehadiran Masyarakat yang tidak dapat diperediksi.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kota Batam

Dengan tidak tercapainya target program dimaksud maka berakibat pada belum Terwujudkan pembangunan manusia yang unggul dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025  
Kota Batam**

**Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan : Unsur Pemerintahan Umum									
	Bidang Urusan: Kesatuan Bangsa dan Politik									
	<b>Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>78.50</b>	-	-	-	-	<b>71.46</b>	<b>71.46</b>	<b>100</b>
		<b>Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD</b>	<b>95</b>	-	-	-	-	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100</b>
	<b>Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>Output</i> ) /Sub Kegiatan ( <i>Sub Output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		
	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	-	-	-	-	-	-
	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 orang	-	-	-	-	51 orang/bulan	51 orang/bulan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	100%
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Persentase ASN yang</b>	<b>12%</b>	-	-	-	-	<b>13%</b>	<b>13%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>Output</i> ) /Sub Kegiatan ( <i>Sub Output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		
	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>dingkatkan kompetensinya</b>							
	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	285 Paket	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	39 orang	-	-	-	-	6 orang	6 orang
	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	-	-	-	-	6 Paket	6 Paket
	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	600 Paket	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>Output</i> ) /Sub Kegiatan ( <i>Sub Output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)			
		Disediakan								
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	-	-	-	-	2 Paket	2 Paket	100%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
	<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
	Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	200 Unit	-	-	-	-	35 Unit	35 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>Output</i> ) /Sub Kegiatan ( <i>Sub Output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)			
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	125 Unit	-	-	-	-	13 Unit	13 Unit	100%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	78 Laporan	-	-	-	-	14 Laporan	14 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>Output</i> ) /Sub Kegiatan ( <i>Sub Output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		
		Disediakan							
	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	-	-	-	-	3 Unit	3 Unit
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	-	-	-	-	70 Unit	70 Unit
	<b>PROGRAM : PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER</b>	<b>Persentase Kebijakan Ideologi Pancasila dan</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		
	<b>KEBANGSAAN</b>	<b>Karakter Kebangsaan yang Dilaksanakan</b>							
	<b>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Kebijakan Ideologi dan Karakter Kebangsaan yang dihasilkan</b>	<b>40 Kebijakan</b>	-	-	-	-	<b>6 Dokumen</b>	<b>6 Dokumen</b>
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	780 Orang	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	1.380 orang	-	-	-	-	300 orang	300 orang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		
	Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							
	Sub Kegiatan : Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1.685 Keluarga	-	-	-	-	150 Keluarga	150 Keluarga
	Sub Kegiatan : Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	310 Orang	-	-	-	-	50 Orang	50 Orang
	Sub Kegiatan: Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	17 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>Output</i> ) /Sub Kegiatan ( <i>Sub Output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	115 Dokumen				-	-	-
	<b>PROGRAM: PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Persentase pendidikan politik yang dilaksanakan</b>	<b>95%</b>	-	-	-	-	<b>95%</b>	<b>95%</b>
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Sosialisasi pendidikan politik yang dilaksanakan	82 Kegiatan	-	-	-	-	12 Kegiatan	12 Kegiatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)			
		<b>Persentase ketetapan dan kesesuaian laporan pertanggungjawaban partai politik</b>	86%					80%	80%	100%
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4060 orang	-	-	-	-	205 orang	205 Orang	100%
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan	74 Laporan	-	-	-	-	16 Laporan	16 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>Output</i> ) /Sub Kegiatan ( <i>Sub Output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		
	dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
	<b>PROGRAM : PEMERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase peserta pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>93%</b>	-	-	-	-	<b>85%</b>	<b>85%</b>
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	224 Rekomendasi	-	-	-	-	34 Rekomendasi	34 Rekomendasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>Output</i> ) /Sub Kegiatan ( <i>Sub Output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)			
	<b>Kemasyarakatan</b>	<b>Kemasyarakatan yang dilaksanakan</b>								
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6.030 orang	-	-	-	-	3.100 orang	3.100 orang	100%
	<b>PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan agama yang dilaksanakan</b>	<b>98%</b>	-	-	-	-	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>
		<b>Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)			
	<b>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Persentase Ketahanan keluarga yang difasilitasi</b>	<b>84%</b>	-	-	-	-	<b>64%</b>	<b>64%</b>	<b>100%</b>
		<b>Jumlah Kelurahan yang Memiliki Satgas Kelurahan Bersih dari Narkoba (Bersinar)</b>	<b>64 Kelurahan</b>	-	-	-	-	<b>50 Kelurahan</b>	<b>50 Kelurahan</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2.250 orang	-	-	-	-	1.387 orang	1.387 orang	100%
	<b>PROGRAM : PENINGKATAN</b>	<b>Persentase Rekomendasi</b>	<b>90%</b>	-	-	-	-	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>Output</i> ) /Sub Kegiatan ( <i>Sub Output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		
	<b>KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Hasil Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>							
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<b>Rekomendasi forum kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial di daerah</b>	<b>105 Rekomendasi</b>	-	-	-	-	<b>18 Rekomendasi</b>	<b>18 Rekomendasi</b> <b>100%</b>
		<b>Persentase Masyarakat yang mendapatkan pemahaman Kewaspadaan dan Deteksi Dini</b>	<b>85%</b>	-	-	-	-	<b>75%</b>	<b>75%</b> <b>100%</b>
	Sub Kegiatan : Penyusunan Bahan Rumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	260 Dokumen	-	-	-	-	39 Dokumen	39 Dokumen 100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>Output</i> ) /Sub Kegiatan ( <i>Sub Output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)			
	Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun								
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.560 Orang	-	-	-	-	864 Orang	864 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )/ Kegiatan ( <i>Output</i> ) /Sub Kegiatan ( <i>Sub Output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)			
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	72 Dokumen	-	-	-	-	7 Dokumen	7 Dokumen	100%

Dari tabel perkiraan realisasi pelaksanaan Rencana Kerja 2025 diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** yang terdiri dari 5 kegiatan perkiraan realisasi dapat dilihat bahwa semua kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target restru 2025.
2. **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** memiliki satu kegiatan yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sesuai dengan RKA APBD realisasi pencapaian kinerja sesuai dengan target 100%. Pada program ini, bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Pembentukan Paskibaraka, Sosialisasi Penghayatan dan Pengamalan Pancasila kepada keluarga, Pelaksanaan Bela Negara dan Rapat Rutin Forum Pembauran Kebangsaan dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan kepada Masyarakat.
3. **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** memiliki satu kegiatan yaitu pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah. Realisasi pencapaian kinerja adalah 12 Kegiatan untuk indikator Jumlah Sosialisasi pendidikan politik yang dilaksanakan dan 80% untuk persentase Persentase ketetapan dan kesesuaian laporan pertanggungjawaban partai politik. Pada program ini kinerja yang dihasilkan adalah pelaksanaan Pendidikan politik kepada pemilih pemula, Perempuan pesisir, kaukus Perempuan dan organisasi Masyarakat. Pada tahun ini juga dilaksanakan hibah bantuan keuangan partai politik dan hibah barang berupa kendaraan operasional kepada KPU dan Bawaslu.
4. **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** Pelaksanaan kegiatan pada program ini yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan indikator kegiatan yaitu Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan. Realisasi pencapaian kinerja untuk Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang diusulkan adalah 34 Rekomendasi (100%)..

**5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA** Pelaksanaan kegiatan pada program ini Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan indikator kegiatan Persentase Ketahanan keluarga yang difasilitasi dapat direalisasikan 64% dan Jumlah Kelurahan yang Memiliki Satgas Kelurahan Bersih dari Narkoba (Bersinar) terealisasi 100% (50 Kelurahan).

**6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** Pada program ini memiliki indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional mdan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial terealiasi sesuai target 85%. Realisasi kinerja pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial memiliki indikator Rekomendasi forum kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial di daerah dengan target 85% dan terealisasi sesuai target dan indikator kedua adalah Persentase Masyarakat yang mendapatkan pemahaman Kewaspadaan dan Deteksi Dini terealiasi 75% sesuai target.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Indikator kinerja kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam**

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (tahun n-2)	Tahun 2025 (tahun n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2027 (tahun n+1)	Tahun 2024 (tahun n-2)	Tahun 2025 (tahun n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2027 (tahun n+1)	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat			-	90	90	90	-	90	90	90	
2.	Persentase masyarakat sasaran dan ASN yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan			-	95%	95%	96%	-	95%	95%	96%	
3.	Persentase masyarakat dan Partai Politik yang dibina			-	90%	91%	91%	-	90%	91%	91%	
4.	Persentase organisasi masyarakat yang aktif dan berkinerja			-	67%	70%	75%	-	67%	70%	75%	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (tahun n-2)	Tahun 2025 (tahun n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2027 (tahun n+1)	Tahun 2024 (tahun n-2)	Tahun 2025 (tahun n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2027 (tahun n+1)	
5.	Persentase konsolidasi kerukunan antar agama			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
	Persentase Kelurahan Bersih Narkoba (BERSINAR)			-	89.9%	90%	92%	-	89.9%	90%	92%	
6.	Persentase penanganan potensi konflik			-	85%	85%	85%	-	85%	85%	85%	

#### Keterangan

Indikator mengacu pada Bab VII Renstra Perangkat Daerah

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, penetapan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan Badan sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum pada Badan yang meliputi Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Badan yang meliputi Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Penyelenggaraan koordinasi, konsolidasi dan konsultasi kesatuan bangsa dan politik dengan instansi terkait di Daerah maupun dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- e. Pelaksanaan pembagian tugas, pembinaan, pengarahan dan pengawasan terhadap bawahan atas pelaksanaan urusan kesatuan

bangsa dan politik pada Badan yang meliputi Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pada Badan yang meliputi Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan**

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

#### A. Permasalahan Internal

- 1. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD hibah vertikal hubungan antar Lembaga pemerintah dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam. Dengan aturan tersebut perlunya sumber daya aparatur (SDA) yang memiliki kompetensi khusus teknik sipil/bangunan;
- 2. Nomenklatur sub kegiatan dan indikator sub kegiatan di dalam Keputusan Menteri 05889 tahun 2021 untuk kegiatan hibah vertikal dinilai belum sesuai dengan output pelaksanaan hibah vertikal;

3. Perlu adanya penambahan alokasi anggaran untuk mengakomodir program-program kegiatan yang ada di Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam untuk menunjang kinerja forum-forum yang ada seperti: PPWK, FPK, FKUB, POA, PKS, FORKOPIMDA, FKDM, Lembaga Adat, Paguyuban, Ormas dan Partai Politik dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Kota Batam.

#### B. Permasalahan Eksternal

1. Belum optimalnya ketahanan ekonomi masyarakat;
2. Belum optimalnya pemahaman masyarakat terkait pendirian rumah ibadah dan kerukunan masyarakat;
3. Belum optimalnya kapasitas ormas dalam tata kelola organisasi dan akuntabilitas keuangan;
4. Belum optimalnya pemahaman terkait nilai-nilai pancasila, karakter & wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
5. Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap politik;
6. Belum optimalnya deteksi dan identifikasi potensi konflik sosial;

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yaitu, adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD terkait hibah terkait hubungan antar Lembaga pemerintah dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam. dengan aturan tersebut membutuhkan sumber daya aparatur (SDA) yang memiliki kompetensi khusus teknik sipil/bangunan. Selain itu nomenclatur sub kegiatan dan indikator sub kegiatan di dalam Kepmen 05889 tahun 2021 untuk kegiatan hibah vertikal dinilai belum sesuai dengan output pelaksanaan hibah vertikal. Serta perlunya penambahan anggaran untuk mendukung kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, hal tersebut berdampak terhadap pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam terhadap capaian program sesuai dengan salah satu prioritas

yang terdapat di program RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029 yaitu : Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan dan Kebangsaan, dan Program Pengembangan dan Partisipasi Budaya Politik. Dengan demikian sasaran dan target dari perencanaan RPJMD dan Renstra yang sudah di usulkan belum tercapai maksimal.

Analisis terhadap lingkungan internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Kebijakan yang sudah ada mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam;
2. Ada dasar hukum yang jelas yang mengatur kewenangan, tugas pokok dan fungsi
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia.
4. Penyediaan anggaran kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam
5. Adanya koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah di Kota Batam

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Terbatasnya SDM yang berkualitas dan masih kurangnya kompetensi SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;
2. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam secara mendasar belum menyentuh masyarakat.

### **2.3.3 Tantangan dan Peluang**

Untuk pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

- a. Faktor geografis Kota Batam yang bertekatan dengan negara tetangga dapat menimbulkan kerawanan sosial, budaya, ekonomi dan kondisi dari demografis yang menyulitkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;

- b. Heterogenitas, masyarakat yang memudahkan terjadinya benturan/konflik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- c. Tingkat pertambahan penduduk yang cukup tinggi akibat migrasi dan kelahiran;
- d. Munculnya paham/aliran keagamaan dan kepercayaan yang mengganggu stabilitas masyarakat;
- e. Adanya ketidakjelasan aturan dan kebijakan yang dibuat Pemerintah Pusat & Daerah sehingga melemahkan posisi sehingga melemahkan posisi dan menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi badan;
- f. Tingkat pertumbuhan pencari kerja yang lebih tinggi dibandingkan lapangan kerja yang tersedia sehingga menimbulkan dampak sosial;

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yaitu:

- a. Kota Batam sebagai daerah kawasan pusat perdagangan, industri, pariwisata dan alih kapal dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.;
- b. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- c. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi dan mitra kerja dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan penanganan masalah sosial.
- d. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.

#### **2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan analisis kritikal, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam antara lain:

1. Dengan perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan masuknya budaya luar, sehingga berdampak degredasinya nilai-nilai Ideologi Pancasila di masyarakat.
2. Munculnya ajaran/aliran yang dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah kehidupan masyarakat Batam. Kondisi demikian sangat rawan dan rentan terjadinya pergesekan yang menimbulkan konflik SARA.
3. Tingginya migrasi dari luar Kota Batam yang ingin mencari pekerjaan di Batam, sehingga sarana dan prasarana khususnya perumahan untuk pekerja tidak semuanya mampu disediakan oleh pihak pengelola kawasan industri, akibatnya mereka mendirikan bangunan di lahan kosong untuk tempat tinggal (rumah liar);
4. Belum optimalnya penanganan dan pengawasan terhadap imigran gelap korban negara-negara berkonflik dan perang untuk mencari suaka;
5. Konflik tenaga kerja dengan pengusaha yang dipicu oleh permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta penetapan Upah Minimum Kota (UMK);
6. Belum optimalnya pengawasan terhadap orang asing (Tenaga Kerja Asing) maupun Lembaga Asing yang berada di Kota Batam;
7. Masih terjadinya konflik pendirian rumah ibadah di Kota Batam.
8. Masih Maraknya penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, psikotropika dan zat adiktif dan lainnya di kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum lainnya.
9. Belum optimal pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
10. Belum optimalnya proaktif dari organisasi masyarakat untuk melaporkan keberadaan organisasi ke Pemerintah Kota Batam, dalam hal ini ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.
11. Masih rendahnya kualitas SDM organisasi masyarakat untuk tertib administrasi.

12. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi;
13. Masih rendahnya tingkat partisipasi politik dari kalangan Perempuan, dan keterwakilan Calon Perempuan sebagai Kader Politik;
14. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya;
15. Adanya kecenderung masyarakat tidak aktif dalam politik bahkan generasi muda cenderung apatis dan tidak peduli terhadap masalah politik.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana kerja pemerintah daerah merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan arah kebijakan RKPD.

Review terhadap rencana kerja perangkat daerah Tahun 2026 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026  
Kota Batam**

**Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	9.593.086.153	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Batam	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	95	11.622.388.226	
								Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	74.20		
1	Kegiatan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	-	-	Kegiatan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	5.352.400	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Batam	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	3.433.400	

	Perangkat Daerah					Perangkat Daerah		Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.919.000	
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>8.608.713.086</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>9.209.080.365</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Batam	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	47 orang/bulan	8.530.256.584	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang/bulan	9.114.720.365	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	94.360.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	78.456.502						
<b>3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>66.170.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya</b>	<b>12%</b>	<b>112.102.800</b>	

			<b>yang terlaksana</b>								
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	27.170.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	45.508.800	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	39.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	66.594.000	
<b>4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Batam</b>	<b>Percentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>399.213.996</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Batam</b>	<b>Percentase pemenuhan pelayanan umum perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>747.386.100</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	14.835.522	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	10.726.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	168.205.563	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	200.532.100	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan								
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang	Batam	Jumlah paket barang cetakan	2 Paket	24.585.011	Sub Kegiatan Penyediaan Barang	Batam	Jumlah paket barang cetakan	2 Paket	52.713.000	

	Cetakan dan Penggandaan		dan penggandaan yang disediakan			Cetakan dan Penggandaan		dan penggandaan yang disediakan			
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Batam	Jumlahdokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang- undangan yang disediakan	1 dokumen	5.528.351	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	Batam	Jumlahdokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang- undangan yang disediakan			
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	186.059.549	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	483.415.000	
5	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>174.168.367</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>1.278.860.600</b>	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	60.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	341.568.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	16 Unit	41.268.620	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	52 unit	466.496.000	

	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	72.899.747	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 unit	470.796.600	
6	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi</b>	100%	<b>212.762.240</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan</b>	100%	<b>134.085.961</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.145.750	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.430.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah laporan penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	194.616.490	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah laporan penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13 Laporan	131.655.961	
7	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi</b>	100%	<b>132.058.464</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik</b>	100%	<b>135.520.000</b>	

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	1 unit	45.816.202	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	1 unit	39.780.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	5 unit	42.441.605	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	3 unit	42.740.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 unit	43.800.657	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 unit	53.000.000	
II	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Batam	<b>1. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan "yang Dilaksanakan"</b>	100%	<b>184.545.599</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Batam	<b>Persentase Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan</b>	100%	<b>7.211.879.600</b>	
			<b>2. Cakupan Peserta Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter</b>	100%							

			Bangsa serta Jumlah Total Calon Peserta yang Seharusnya								
8	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Batam	1. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Ditindaklanjuti	100%	184.545.599	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Batam	Kebijakan Ideologi dan karakter kebangsaan yang dihasilkan	7 Dokumen	7.211.879.600	
			2. Persentase Peserta yang Bersertifikat Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%							
	Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Batam	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	250 orang	34.545.599						
	Sub Kegiatan	Batam	Jumlah orang	680	50.000.000	Sub Kegiatan	Batam	Jumlah orang	300 Orang	800.283.000	

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	orang		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan			
	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	180 keluarga	50.000.000	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Batam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	600 Keluarga	373.988.000	
	Sub Kegiatan	Batam	Jumlah orang	60 orang	50.000.000	Sub Kegiatan	Batam	Jumlah	60 Orang	5.433.189.100	

	Pembentukan Paskibraka		anggota Paskibraka			Pembentukan Paskibraka		Paskibraka			
						Sub Kegiatan: Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Batam	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	3 dokumen	490.299.500	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Batam	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	25 Dokumen	114.120.000	
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Batam	<b>1.Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang Ditetapkan</b>	<b>100%</b>	<b>8.893.421.261</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Batam</b>	<b>Persentase Pendidikan politik yang dilaksanakan</b>	<b>95%</b>	<b>6.156.859.365</b>	
			<b>2.Persentase Peningkatan Pemahaman Peserta Peran Partai Politik dan</b>	<b>100%</b>							

			Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik								
9	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Batam	1. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang akan diusulkan	100%		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Batam	Jumlah sosialisasi Pendidikan politik yang dilaksanakan	14 Kegiatan	6.156.859.365	
			2. Persentase Pemahaman peserta Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan	100%				Persentase ketetapan dan kesesuaian laporan pertanggungjawaban partai politik	80%		

			<b>Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>								
			<b>3. Persentase Peserta/Unit yang dimonev dan Menindaklanjuti Hasilnya</b>	<b>85%</b>							
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Batam	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30 orang	8.512.268.619	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Batam	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	195 Orang	5.721.690.165	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi	Batam	Jumlah laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan	15 laporan	381.152.642	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi	Batam	Jumlah laporan Hasil Monitoring,	15 Laporan	435.169.200	

	dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.		Pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.		Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.			
IV	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Batam	Jumlah Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Ditetapkan/ dilaksanakan	1 Kebijakan	3.781.396.923	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Batam	Percentase peserta pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakata n	87%	<b>2.659.188.300</b>	
10	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Batam	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30 Rekomenda si	3.781.396.923	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Batam	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	40 Rekomenda si	<b>2.659.188.300</b>	

	<b>Kemasyarakatan</b>		<b>yang diusulkan</b>			<b>Kemasyarakatan</b>		<b>Kemasyarakatan yang dilaksanakan</b>			
			<b>2. Persentase Peserta Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>100%</b>							
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Batam	Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	400 orang	3.781.396.923	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Batam	Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.430 orang	2.659.188.300	
V	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Batam	<b>1. Jumlah Kebijakan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Ditetapkan</b>	1 Kebijakan	<b>4.314.893.460</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Batam	<b>1. Persentase Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan agama yang dilaksanakan</b>	<b>95%</b>	<b>8.431.249.700</b>	

			<b>2. Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif</b>	100%				<b>2. Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif</b>	100%		
11	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Batam	<b>1. Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti</b>	100%	<b>4.314.893.460</b>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Batam	<b>1. Jumlah kelurahan yang memiliki Satgas kelurahan bersih dari Narkoba (Bersinar)</b>	<b>64</b> Kelurahan	<b>8.431.249.700</b>	
			<b>2. Jumlah Kelurahan yang Memiliki Satgas Kelurahan Bersih dari Narkoba (Bersinar)</b>	<b>13 Kelurah n"</b>				<b>2. Persentase Ketaahanan keluarga yang difasilitasi</b>	<b>34%</b>		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Batam	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1000 orang	4.314.893.460	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Batam	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.754 Orang	8.431.249.700	

			Penghayat Kepercayaan di Daerah					Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
VI	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Batam	<b>1. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang Ditetapkan</b>	100%	<b>2.869.553.584</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Batam	<b>Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	85%	<b>57.810.267.984,79</b>	
			<b>2. Persentase Rekomendasi Forkopimda yang Ditetapkan sebagai Kebijakan</b>	86%							
			<b>3. Persentase Potensi Konflik yang Terdeteksi</b>	80%							
12	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Batam	<b>1. Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi</b>	100	<b>2.869.553.584</b>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Batam	<b>1. Rekomendasi forum kewaspadaan dini dan penanganan konflik social di daerah</b>	20 Rekomenda si	<b>57.810.267.984,79</b>	

		<b>Penanganan Konflik Sosial</b>									
		<b>2. Jumlah Potensi Konflik yang Terdeteksi</b>	<b>33 konflik</b>				<b>Persentase Masyarakat yang mendapatkan pemahaman kewaspadaan dan deteksi dini</b>	<b>85%</b>			
		<b>3. Persentase Masyarakat (Peserta Bimtek) yang Mampu Membantu Melakukan Kewaspadaan dan Deteksi Dini</b>	<b>75%</b>								
	Sub Kegiatan penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah.	Batam	Jumlah kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah yang disusun.	6 dokumen	2.000.000.000	Sub Kegiatan penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah.	Batam	Jumlah kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah.	37 dokumen	55.316.691.351,79	

							serta Penanganan Konflik di daerah yang disusun.				
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan anatar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	Batam	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	287 orang	869.553.584	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan anatar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	Batam	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan anatar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	65 orang	730.484.000	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.763.092.633	
	TOTAL :				<b>29.636.896.980</b>					<b>93.891.833.175,79</b>	

Catatan : Untuk Tabel ini diisi pada saat Rancangan Renja, setelah terbitnya Rancangan Awal RKPD

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *bottom up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Batam hingga Tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *top down* dari kunjungan kerja Wali Kota dan Reses DPRD.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjaringan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui SIPD yang diajukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Selanjutnya akan ditentukan usulan prioritas yang dapat diakomodir oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam**

**Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
<b>N I H I L</b>					

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menggariskan Visi Indonesia tahun 2026 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2026 berada pada tahap jangka menengah yang pertama yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.

Program dan kegiatan Tahun 2025-2029 Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam disusun dengan mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat yang telah dibahas sebelumnya pada Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan. Melalui penyelarasan program kegiatan dari unit kerja dengan skala prioritas usulan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan hasil reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka disusunlah prioritas Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam. Beberapa prioritas program pembangunan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditentukan dapat di implementasikan dalam mencapai sasaran pembangunan Kota Batam maka strategi pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dalam program pembangunan daerah. Dalam program prioritas atau unggulan daerah sesuai dengan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang disinkronkan dengan program pembangunan daerah, tetapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam tidak terdapat didalam program tersebut diatas dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Pelayanan Fungsi Unsur Pemerintahan Umum.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah Persentase Penurunan Konflik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut tentunya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam secara spesifik berada pada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

Hubungan antara prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional Dengan Prioritas Pembangunan Kota Batam Tahun 2026**

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Batam
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;	

Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Ikeatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan Infrastruktur yang Modern, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan (P4).
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing (P5).
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Daya Saing Daerah (P1).
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi (P2).
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat (P3).

Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyalundupan	
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	

Sumber: RPJMN 2025-2029&RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029, (diolah).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional 1 memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia dan Prioritas Nasional 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur. Program yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yang selaras pada prioritas tersebut Adalah Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dan Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam secara struktural dibawah Direktorat Jenderal Politik dan pemerintahan Umum kementerian Dalam Negeri RI, untuk itu arah kebijakan dari pusat pada tahun 2025 yang sesuai dengan bidang politik dan pemerintahan umum antara lain :

1. Kerukunan umat beragama di daerah;
2. Kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebhinekaan;
3. Kinerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di daerah;
4. Penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila;
5. Pengembangan kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini;
6. Kewaspadaan dini dan deteksi dini di daerah;

7. Pendidikan politik dan Penguatan ideologi Pancasila bagi Pengurus Partai Politik
8. Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah;
9. Peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesbangpol dalam pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
10. Pembinaan dan Pemberdayaan serta pengawasan organisasi kemasyarakatan;
11. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberatasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN);
12. Peningkatan efektivitas Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025 - 2029 Adapun tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam adalah: Terwujudnya stabilitas daerah yang harmonis untuk keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan;
2. Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi Pancasila;
3. Penguatan peran serta masyarakat dalam kehidupan berpolitik;
4. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Organisasi Masyarakat yang dibina;
5. Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya serta toleransi kerukunan bermasyarakat;
6. Optimalnya penanganan potensi konflik sosial.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Batam Tahun 2026 mengacu pada Renstra PD Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.2 Target Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2026**

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2026
	<b>Terwujudnya stabilitas daerah yang harmonis untuk keselarasan dan keserasian hidup bermasyarakat</b>	<b>Angka Konflik yang terfasilitasi</b>	<b>35 Konflik</b>
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
2	Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi Pancasila	Persentase masyarakat sasaran dan ASN yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	95%
3	Penguatan peran serta Masyarakat dalam kehidupan berpolitik	Persentase Masyarakat dan partai politik yang dibina	91%
4	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Organisasi Masyarakat yang dibina	Persentase organisasi Masyarakat yang aktif dan berkinerja	70%
5	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya serta toleransi kerukunan bermasyarakat	Persentase konsolidasi kerukunan antar agama	100%
		Persentase Kelurahan Bersih Narkoba (BERSINAR)	90%
6	Optimalnya penanganan potensi konflik sosial	Persentase penanganan potensi konflik	85%

Keterangan:

Tujuan/sasaran mengacu pada Bab V Renstra Perangkat Daerah

### 3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2026 mengacu pada pencapaian visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2025 - 2029 yang dirinci dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025 - 2029 Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian Misi 3 Kota Batam Tahun 2025 - 2029 Dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu.

Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam mengusulkan 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, 30 (tiga puluh) sub kegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 93.891.833.175,79 (Sembilan puluh tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh sembilan rupiah). Adapun program dan kegiatan yang disusulkan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan
    - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
    - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
    - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa
    - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
    - 2) Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
    - 3) Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka
    - 4) Sub Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
    - 5) Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan

Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
  - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan daerah Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
    - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
    - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

- a. Kegiatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
  - 1) Sub Kegiatan penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah.
  - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
  - 3) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

**Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiran Maju Tahun 2027**  
**Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	<b>Batam</b>	<b>95</b>	<b>11.622.388.226</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		95	12.618.037.204
		Nilai Sakip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam	<b>Batam</b>	<b>74.20</b>		<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		75.30	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	<b>Batam</b>	<b>100%</b>	<b>5.352.400</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		100%	15.000.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	<b>Batam</b>	2 Dokumen	3.433.400	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		3 Dokumen	10.000.000
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	<b>Batam</b>	3 Laporan	1.919.000	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		3 Dokumen	5.000.000
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Percentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	<b>Batam</b>	<b>100%</b>	<b>9.209.080.365</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		100%	10.760.103.745

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Batam	52 orang/bulan	9.114.720.365	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55 orang/bulan	10.649.173.700
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Batam	12 Dokumen	94.360.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	110.930.045
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	-
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya</b>	<b>Batam</b>	<b>12%</b>	<b>112.102.800</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		<b>12%</b>	<b>77.058.459</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Batam	45 Paket	45.508.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		55 Paket	36.675.799
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Batam	6 Orang	66.594.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Orang	40.382.660
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan umum perkantoran</b>	<b>Batam</b>	<b>100</b>	<b>747.386.100</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		<b>100 %</b>	<b>464.020.732</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Batam	1 Paket	10.726.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	8.021.870
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang	Batam	4 Paket	200.532.100	Pendapatan Asli Daerah		6 Paket	151.112.039

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	Kantor	disediakan				(PAD)			
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Batam	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		600 Paket	20.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Batam	2 Paket	52.713.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	14.827.813
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Batam	12 Laporan	483.415.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Paket	270.059.010
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Percentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan</b>	<b>Batam</b>	<b>100%</b>	<b>1.278.860.600</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		<b>100%</b>	<b>982.684.289</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Batam	1 unit	341.568.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 unit	580.296.959
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Batam	52 unit	466.496.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		35 unit	205.485.503
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Batam	34 unit	470.796.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 unit	186.371.827
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Batam			Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 unit	10.530.000
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>Percentase realisasi penyediaan jasa penunjang</b>	<b>Batam</b>	<b>100%</b>	<b>134.085.961</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>207.448.776</b>

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	<b>Pemerintahan Daerah</b>	<b>sesuai perencanaan</b>				<b>(PAD)</b>			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Batam	12 Laporan	2.430.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 laporan	2.912.903
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Batam	13 Laporan	131.655.961	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13 laporan	204.535.873
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik</b>	<b>Batam</b>	<b>100%</b>	<b>135.520.000</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		<b>100</b>	<b>111.721.203</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	Batam	1 Unit	39.780.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 unit	1.198.725
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	Batam	3 Unit	42.740.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 unit	51.952.757
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Batam	76 Unit	53.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		70 unit	58.569.721
	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan</b>	<b>Batam</b>	<b>100%</b>	<b>7.211.879.600</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		<b>100</b>	<b>5.550.915.403</b>
	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan</b>	<b>Kebijakan Ideologi dan Karakter Kebangsaan yang</b>	<b>Batam</b>	<b>7 Dokumen</b>	<b>7.211.879.600</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>8 Dokumen</b>	<b>5.590.915.403</b>

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	<b>Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa</b>	dihadirkan				(PAD)			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	Batam	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		185 orang	500.000.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	Batam	300 orang	800.283.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		180 orang	908.014.690
	Sub Kegiatan Pembentukan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran masyarakat akan Pentingnya Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Batam	600 Keluarga	373.988.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		170 Keluarga	148.862.511

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Batam	60 orang	5.433.189.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 orang	3.650.445.636
	Sub Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Batam	3 Dokumen	490.299.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Dokumen	52.132.566
	Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Batam	25 Dokumen	114.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Dokumen	291.460.000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Percentase Pendidikan politik yang dilaksanakan</b>	<b>Batam</b>	<b>95%</b>	<b>6.156.859.365</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		95%	11.992.201.473
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1. Jumlah sosialisasi Pendidikan politik yang dilaksanakan	Batam	14 Kegiatan	6.156.859.365	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18 Kegiatan	11.992.201.473
		2. Percentase ketetapan dan kesesuaian laporan pertanggungjawaban partai politik	Batam	80%		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		82%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Batam	195 Orang	5.721.690.165	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		900 orang	11.791.331.662
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Batam	15 Laporan	435.169.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	200.869.811
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Percentase peserta pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>	<b>Batam</b>	<b>87%</b>	<b>2.659.188.300</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		90%	2.287.108.074

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan	Batam	40 Rekomendasi	2.659.188.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45 rekomendasi	2.287.108.074
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Batam	3430 orang	2.659.188.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		400 orang	2.287.108.074
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	1. Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif	Batam	100%	8.431.249.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	4.500.707.910
		2. Persentase kebijakan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya yang ditetapkan	Batam	95%		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		96%	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Jumlah kelurahan yang memiliki satgas kelurahan bersih dari narkoba	Batam	64 kelurahan	8.431.249.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		64 kelurahan	4.500.707.910
		2. Persentase ketahanan keluarga yang difasilitasi	Batam	34%		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50%	
								1.100 orang	4.500.707.910

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Batam	1754 Orang	8.431.249.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Percentase rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi bidang kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial</b>	<b>Batam</b>	<b>85%</b>	<b>57.810.267.984 ,79</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		85%	55.210.000.000
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Rekomendasi forum kewaspadaan dini dan penanganan konflik social di daerah	<b>Batam</b>	<b>20 Rekomend asi</b>	<b>57.810.267.984 ,79</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		20 Rekomend dasi	55.210.000.000
		2. Percentase Masyarakat yang mendapatkan pemahaman kewaspadaan dan deteksi dini	<b>Batam</b>	<b>85%</b>		<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		85%	
	Sub Kegiatan penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang	Jumlah kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang	Batam	37 dokumen	55.316.691.351, 79	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		41 Dokumen	51.728.709.724

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah.	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah yang disusun.							
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	Batam	65 orang	730.484.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		495 orang	614.130.982
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	1 Dokumen	1.763.092.633	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	13 Dokumen	2.867.159.294
<b>TOTAL</b>					<b>93.891.833.175,79</b>				<b>92.158.970.064</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam pada perencanaan tahun 2025 merupakan tahun ke-1 dalam Renstra Tahun 2025 - 2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam untuk Tahun 2026 melaksanakan 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, 30 (tiga puluh) sub kegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 93.891.833.175,79 (Sembilan puluh tiga miliar delapan ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh sembilan rupiah). jenis sub kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026**

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM**  
**TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						93.891.833.175,79								708.592.566,00		
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						93.891.833.175,79								708.592.566,00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						93.891.833.175,79								708.592.566,00		
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Keselektarisan PD Nilai SAKIP PD				95 74,20	11.622.388.226,00						-		365.000.000,00		
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	-			100 %	5.352.400,00			-	1. Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	-	-		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.433.400,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	-			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	1.919.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	-			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	-			100 %	9.209.080.365,00			-	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	9.114.720.365,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	94.360.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawai dan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	-			12 %	112.102.800,00			-	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	46.508.800,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	66.594.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	-			100 %	747.388.100,00			-	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.726.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	200.632.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	52.713.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	483.415.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	-			100 %	1.278.880.600,00			-	-	-			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	341.558.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SA SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					52 Unit	468.496.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					34 Unit	470.796.600,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	-			100 %	134.085.961,00			-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	2.430.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Rering	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					13 Laporan	131.655.961,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan bertungsi dengan baik	-			100 %	135.520.000,00			-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	39.780.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3 Unit	42.740.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					76 Unit	53.000.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCA SILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Percentase Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Dilaksanakan				100 %	7.211.879.600,00							343.592.566,00		
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kebijakan Ideologi dan Karakter Kebangsaan yang dihasilkan	-			7 Dokumen	7.211.879.600,00			-	-	Masyarakat, SLTA	-	343.592.566,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS									
											NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembuatan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					300 Orang	800.283.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat, SLTA		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				600 Keluarga	373.988.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat, SLTA		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka				60 Orang	5.433.189.100,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat, SLTA		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Pumapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Pumapaskibraka Duta Pancasila				3 Dokumen	490.299.500,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat, SLTA		52.132.566,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Pumapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Pumapaskibraka Duta Pancasila				25 Dokumen	114.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing	Masyarakat, SLTA		291.460.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Percentase pendidikan politik yang dilaksanakan				95 %	6.156.859.365,00							0,00					
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Penyalinan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Sosialisasi pendidikan politik yang dilaksanakan Percentase ketepatan dan kesesuaian laporan pertanggungjawaban partai politik	-			14 Kegiatan 80 %	6.156.859.365,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SA SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				195 Orang	5.721.690.165,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				15 Laporan	435.169.200,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peserta pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan				87 % 40 Rekomendasi	2.659.188.300,00						-	0,00			
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan	-			40 Rekomendasi	2.659.188.300,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				3430 Orang	2.659.188.300,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Percentase Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan agama yang dilaksanakan Percentase Kelurusan dengan Satgas Kelurusan Bersinar aktif				95 % 100 %	8.431.249.700,00						-	0,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS									
											NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kelurahan yang Memiliki Satgas Kelurahan Bersih dan Narkoba (Bersinar) Persentase Ketahanan keluarga yang difasilitasi	-			64 Kelurahan 34 %	8.431.249.700,00			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1754 Orang	8.431.249.700,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Percentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				85 %	57.810.267.984,79							0,00					
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Percentase Masyarakat yang mendapatkan pemahaman Kewaspadaan dan Deteksi Dini Rekomendasi forum kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial di daerah	-			85 % 20 Rekomendasi	57.810.267.984,79			-	-	-	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				37 Dokumen	55.316.691.351,79	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				65 Orang	730.484.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1.763.092.633,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
		J U M L A H					93.891.833.175,79							708.592.566,00				

## **BAB V** **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam pada Tahun 2026 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya.

### **5.1 Catatan Penting**

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025-2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2026 terdiri atas 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2026, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2026.

## **5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2025 – 2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2026 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedoman hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah).
2. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.

## **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Program dan kegiatan pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas

dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, maka seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2026 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD